

**ANALISIS KOMPETENSI PERANGKAT DESA, KEPEMIMPINAN, KEPALA DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN BAJENG BARAT KABUPATEN GOWA**

**Burhanuddin<sup>1</sup>, Andi Syarifuddin<sup>2</sup>, Iqbal<sup>3</sup>**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP<sup>1,2,3</sup>

burhanuddin@gmail.com<sup>1</sup>, <sup>2</sup>andisyarifuddin67@gmail.com, iqbal317@gmail.com<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT**

*This research aims at finding out: 1) the influence of village officials competence towards village financial accountability in Bajeng Barat District, Gowa Regency, (2) the influence of village head leadership towards village financial accountability in Bajeng Barat District, Gowa Regency, (3) the influence of community participation towards village financial accountability in Bajeng Barat District, Gowa Regency, (4) the influence of village officials competence, village head leadership and community participation simultaneously towards village financial accountability in Bajeng Barat District, Gowa Regency. The method used in this research was quantitative analysis method, with 111 respondents as sample. The hypothesis testing used was multiple linear regression with SPSS 22. The result of this research showed that: (1) there was no influence of village officials competence towards village financial accountability in Bajeng Barat District, Gowa Regency, (2) village head leadership has positive and significant influence towards village financial accountability in Bajeng Barat District, Gowa Regency, (3) community participation has positive and significant influence towards village financial accountability in Bajeng Barat District, Gowa Regency, (4) simultaneously village officials competence, village head leadership and community participation have positive and significant influence towards village financial accountability in Bajeng Barat District, Gowa Regency with determination test (R<sup>2</sup>) was 69.99% and 30.01 % was influenced by other variables.*

**Keywords:** *competence, leadership, community participation, accountability, financial village.*

---

**PENDAHULUAN**

Pemerintahan yang memberikan kekuasaan serta wewenang penuh dari pemerintah pusat ke masing-masing daerah di seluruh Indonesia disebut sistem desentralisasi. Untuk tujuan efisiensi dan efektivitas dalam peningkatan fungsi pelayanan ke seluruh lapisan masyarakat terutama pada aspek politik, administrasi dan fiskal (Nadir, 2013).

Pada prinsipnya desentralisasi memberikan wewenang kepada pemerintah dimulai dari tingkatan paling bawah untuk mengatur wilayahnya berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, program pemerintah dapat dilaksanakan sampai kepada masyarakat di tingkat bawah. Bentuk desentralisasi yaitu pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan ke pemerintah desa secara otonom sebagai dasar pembangunan.

Pembangunan dari tingkat desa salah satu kebijakan dalam menjawab masalah sosial mendasar yang dirasakan oleh masyarakat di Indonesia berupa kemiskinan dan pembangunan yang tidak merata. Pencairan dana desa sudah lima tahun dengan anggaran secara keseluruhan telah disalurkan sebesar Rp 257 triliun selama 5 tahun. Jumlah dana desa tersebut yang dicairkan seluruh Indonesia adalah sebesar 100% dibagi menjadi 77% dibagi rata seluruh desa dan 20% dialokasikan untuk tambahan kepada desa berdasarkan; (1) jumlah penduduk, (2) tingkat kemiskinan, (3) tingkat kendala luas wilayah dan geografis (4) dan sisanya untuk desa yang masih tertinggal sebesar 3%. Distribusi dana desa mulai tahun 2015 telah disalurkan ke 74.093 desa dengan jumlah masing-masing setiap desa menerima Rp. 280 juta.

Pada tahun 2018 jumlah desa yang menerima dana tersebut sebanyak 74.958 dengan nilai rata-rata yang diterima sebesar

Rp. 800,5 juta setiap desa. Sedangkan pada tahun 2019 penyaluran dana desa sebanyak 74.953 desa yang telah menerima dana tersebut dengan jumlah dana yang diterima setiap desa sebesar Rp. 933,9 juta. Keberadaan dana desa ini diperuntukkan untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat di desa.

Pengalokasian dana desa pada tahun 2019, penggunaan anggaran dikelola dengan baik di setiap daerah. Penggunaan dana desa dimaksimalkan dalam rangka pembangunan desa guna dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Penggunaan dana desa selain pembangunan infrastruktur desa juga diarahkan dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk mendukung dan mencapai arah penyaluran dana desa hal yang menjadi prioritas dilaksanakan adalah (1) mendorong kenaikan anggaran dana desa, (2) menyempurnakan rumus pembagian dana desa dengan tetap mengacu kepada aspek pemerataan dan berkeadilan, (3) pemanfaatan dana desa yang optimal ke beberapa kegiatan yang menjadi kebutuhan yang utama di desa, (4) pekerjaan pembangunan sarana fisik dengan padat karya tunai, (5) Meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat, dan (6) meningkatkan sinergi dengan cara bermitta dengan dunia usaha.

Optimalisasi penyerapan dana desa diikuti dengan kebijakan bahwa pelaksanaan kegiatan diarahkan dengan pengelolaan sendiri sumber-sumber alam dan tenaga kerja seperti penggunaan raw material lokal dan tenaga kerja lokal setempat dalam meningkatkan taraf penghasilan masyarakat desa

Firmansyah (2019), lima tahun terakhir penyaluran dana desa telah nampak dan dirasakan oleh masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan hidup dasarnya dan beberapa kegiatan ekonomi desa juga telah bertumbuh.

Dampak lain dari penyaluran dana desa tersebut terbukti efektif dan dianggap telah memberikan hasil seperti penurunan angka kemiskinan dari 37% menjadi 30%, pergeseran pendapatan perkapita mencapai 50%, PKT telah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sehingga rasio pengangguran di desa mengalami penurunan berbanding terbalik dengan perkotaan yang terus meningkat.

Selain itu, telah terjadi pergeseran dengan berubahnya sejumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang (Gatra, 2019). Kementerian keuangan telah menyalurkan dana desa ke seluruh desa di Indonesia dan distribusi dana tersebut menjadi akumulasi pendapatan keuangan bagi desa yang dikelola oleh pemerintah desa dalam wewenangnya sebagai pengelola keuangan desa.

Beberapa permasalahan yang telah terjadi kemudian menyeret kepala Desa dalam kasus penyelewengan ataupun korupsi yang kemudian di penjara karena ketidaksiapan menerima mental dan kemampuan dalam menjadi penanggungjawab keuangan Desa. Selain itu, pengelolaan keuangan Desa masih sering mendapat sorotan dari masyarakat karena penggunaan keuangan desa terutama dalam kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan lainnya belum terlihat partisipasi masyarakat, yang kemudian memberikan ruang untuk kepala desa mengatur arus pengeluaran keuangan Desa dan kemudian berimplikasi kepada hasil kegiatan yang kurang berkualitas.

Fenomena yang menjadi beberapa permasalahan pengelolaan keuangan di desa yakni; (1) kualitas perangkat desa yang masih rendah yang terdiri dari kualitas pengetahuan menyangkut peraturan dan legalitas lainnya dan kualitas kerja yang optimal, berdampak otomatis terhadap keterlambatan pengelolaan keuangan desa, pelaporan keuangan yang belum akurat, dan keuangan desa belum dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis (2) Penyaluran dana keuangan desa sering terlambat dari pemerintah pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten, pemerintah kabupaten ke desa, (3) penggunaan keuangan desa tidak sesuai dengan RAPBDes, (4) penyalagunaan wewenang oleh kades yang kemudian berdampak pada penyalagunaan keuangan untuk memperkaya diri sendiri.

Beberapa permasalahan sehubungan dengan program tersebut adalah; (1) pemanfaatan dana desa diluar bidang prioritas, belum terdapat bukti yang memadai terhadap berbagai pengeluaran yang didanai, (2) pekerjaan konstruksi dipihak ketigakan atau menggunakan pihak penyedia jasa, (3) kelebihan pembayaran, (4) kesalahan dalam pemungutan dan penyeteroran pajak (5) dana desa masih banyak disimpan di rekening kas kepala desa dan bukan dsimpan di Rekening Kas Desa, (6) pengeluaran dana desa di APB

Desa yang telah anggarkan Kemenkeu (2016;19).

Dari hasil identifikasi terhadap beberapa kendala yang menjadi factor yang mengakibatkan pengelolaan keuangan di desa tidak berjalan dengan baik adalah keterlambatan dalam penyusunan dan penyampaian anggaran, pelaporan yang belum sesuai, pengeluaran dana desa tidak tepat waktu atau menyeberang ditahun anggaran berikutnya. (Mada, Kalangi, & Gamaliel, 2018).

Berdasarkan beberapa uraian di atas, permasalahan mendasar terhadap akuntabilitas keuangan di desa menjadi rendah karena; (1) masih rendahnya kompetensi perangkat desa sebagai pembantu kepala desa, (2) kepemimpinan pemerintah desa masih lemah dan (3) dukungan masyarakat dalam pembangunan terutama pada pengawasan dana desa belum optimal.

Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan tersebut diatas, penulis ingin lebih jauh meneliti dan menganalisis dengan mengangkat dalam judul karya ilmiah yaitu; Pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas keuangan desa di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kec. Bajeng Barat Kabupaten Gowa?; 2) Bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa?; 3) Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kec. Bajeng Barat Kabupaten Gowa?; 4) Bagaimana pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kec. Bajeng Barat Kab.Gowa?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa; 2) Mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kec. Bajeng Barat Kab.Gowa; 3) Mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat desa terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa; 4) Mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat desa secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Keberadaan sumber daya manusia dalam organisasi baik organisasi privat maupun organisasi publik harus dibangun dalam rangka tercipta kapasitas yang unggul dan profesional yang memiliki kompetensi, sehingga keberadaannya mampu menjadi daya dobrak dalam persaingan yang ketat di era komputerisasi dan digital ini, serta dapat mengikuti keinginan situasi dan kondisi sosial masyarakat yang berubah dengan pesat. Modal manusia yang syarat dengan kompetensi merupakan modal kekuatan besar bagi setiap organisasi, karena kompetensi inilah menjadi pemicu kinerja yang kemudian dapat memberikan sumbangsi kinerja secara keseluruhan bagi organisasi

Setiap organisasi dalam mencari personal (tenaga kerja) memiliki standar operasional dalam merekrut personal (personal selection), perencanaan pengalihan tugas, penilaian kinerja dan pengembangan. dan salah satu syaratnya yang harus dipenuhi adalah kompetensi yang unggul (istimewa) dan menganulir seseorang yang berkompotensi rendah (terbatas). Menurut M. Lyle Spencer, kompetensi memiliki lima karakteristik (ciri) yaitu motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan (F. Prihadi, 2004).

Tujuan dari penggunaan model-model kompetensi adalah dapat memberikan nilai yang bersaing, proses pengembangan direncanakan dengan baik dan seiring dengan visi, misi, strategi, tantangan-tantangan, maupun arah yang ingin dicapai organisasi. Untuk itu pemilihan model-model kompetensi yang tepat dapat memberi jalan pemenuhan kebutuhan organisasi, mudah dalam pelaksanaan dan menunjukkan hasil yang cepat.

Kompetensi menjadi indikator yang sangat berpengaruh terhadap penilaian kinerja setiap orang dalam tugasnya dan kinerja organisasi secara menyeluruh. Bagaimana Anda dapat mencari tahu kompetensi yang diprioritaskan oleh organisasi dalam

meningkatkan kinerja yang baik? Jawabannya adalah; Pertama, mengerti tujuan dan visi organisasi dan langkah-langkahnya, Kedua, mengidentifikasi job-job kunci organisasi.

Salah satu organ yang menjadi pembantu dalam melaksanakan pemerintahan di setiap desa adalah perangkat desa. Perangkat desa adalah pembantu pemerintah desa dalam menggerakkan roda pemerintahan pada tingkat paling bawah di Negara Republik Indonesia (Kedesa, 2016).

Undang-Undang Desa pada pasal 50, persyaratan menjadi perangkat desa; (1) Pendidikan minimal SMU atau sederajat, (2) Umur minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun, (3) penduduk desa atau berdomisili minimal kurang dari 1 tahun sebelum pendaftaran, (4) Dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

Sekertaris desa, pelaksana kewilayahan serta pelaksana teknis merupakan organ perangkat desa yang memiliki tugas membantu kepala desa. Hal tersebut diterangkan dalam UU Desa pasal 49 dalam pengangkatan dan pemberhentian serta pelaksanaan fungsi dan tugas dari seorang perangkat desa. Mengenai pemberhentian sebagai perangkat desa terjadi setelah dikonsultasikan kepada kepala kecamatan atas nama kepala daerah. Perangkat desa memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, perangkat desa berakhir masa jabatannya bilamana wafat, mengundurkan diri, dan atau diberhentikan. Perangkat desa yang berakhir masa jabatannya karena diberhentikan disebabkan oleh beberapa hal yaitu umur paling tinggi enam puluh tahun, tidak bisa lagi menjalankan tugas, tidak memenuhi persyaratan, terjadi pelanggaran sebagai Perangkat Desa. Berdasarkan ketentuan yang penetapannya di atur dalam pasal 53 ayat (2) huruf d Undang-Undang Desa, pelanggaran peraturan salah satu dasar untuk membebastugaskan perangkat desa.

Pemberdayaan masyarakat dapat terjadi bilamana masyarakat secara umum diberikan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Masyarakat yang turut serta dalam proses mencari permasalahan serta potensi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga terlibat dalam proses penanganan dan terlibat dalam penyelesaian masalah dan turut mengawasi dan mengevaluasi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

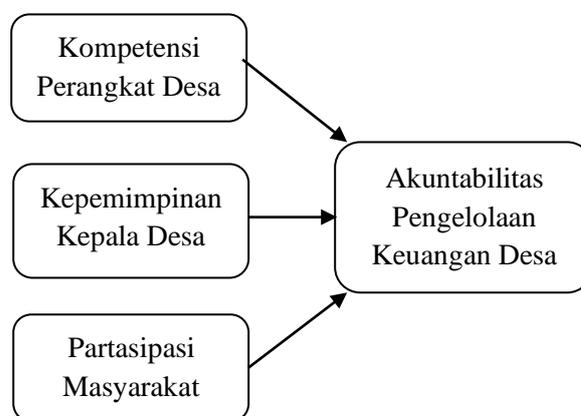
Adminitrasi pemerintahan terdiri dari lembaga eksekutif, legeslatif, dan eksekutif sangat berhubungan yang syarat dengan akuntabilitas. Akuntabilitas itu sendiri di pemerintahan publik dapat diartikan dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), berkapasitas dalam memberikan jawaban (*answerability*), bisa dipersalahkan (*blameworthiness*), dan ketidakbebasan (*liability*).

Pengertian akuntabilitas dalam disiplin ilmu akuntansi didefinisikan sebagai pertanggungjelas. Akuntabilitas sebuah organisasi bila mampu memberikan informasi terkini kondisi dan aktivitas yang telah dilaksanakan Istilah akuntabilitas berbeda dengan responsibilitas atau diartikan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari sebuah ke- wajiban, apakah diterima ataupun ditolak, diberikan apresiasi ataukah diberikan hukuman atas pelanggaran ataukah penyalagunaan wewenang.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan dan beberapa penelitian terdahulu, maka kerangka konsepsional yang dibangun dalam rangka penelitian; pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

**Gambar 1. Model Penelitian**



Sumber: Burhanuddin (2019)

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Pada pendekatan penelitian tersebut, mengukur data angka-

angka dan statistik objektif dengan menggunakan perhitungan ilmiah dengan sampel yang disebar kepada subyek penelitian yang diminta untuk memberikan jawaban kuisiner yang dilaksanakan dalam rangka penelitian tersebut.

Lokasi yang menjadi dijadikan tempat penelitian adalah tujuh (7) desa yang berada di kecamatan Bajeng Barat yaitu desa Tanabangka, desa Borimatangkasa, desa Manjalling, desa Gentungang, desa Kalemmandalle, desa Mandalle, desa Bontomanai. Adapun waktu penelitian adalah bulan juni sampai agustus 2019. Populasi dalam penelitian adalah sekumpulan individu yang berdomisili di wilayah (desa) di kec. Bajeng Barat Kabupaten Gowa yang terdiri dari tujuh wilayah. Individu yang dimaksud adalah para kepala desa, perangkat desa, BPD serta PKK. Metode pengambilan sampling yang digunakan adalah *rumus Slovin* Sehingga diperoleh sebaran sampel tiap-tiap desa yang terdiri dari pemerintah desa beserta perangkatnya dan organ-organ lainnya di setiap desa di kecamatan Bajeng Barat berjumlah 111 orang.

Pada penelitian ini, metode analisis adalah analisis statistik korelasional dengan menggunakan analisis linier berganda. Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian, analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan software SPSS 22.

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Dimana:

- a = Konstanta (*Intercept*)
- b<sub>1</sub>+b<sub>2</sub> = Koefisien Regresi
- X<sub>1</sub> = Kompetensi Perangkat Desa
- X<sub>2</sub> = Kepemimpinan Kepala Desa
- X<sub>3</sub> = Partisipasi Masyarakat
- Y = Akuntabilitas Keuangan
- e = error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Uji T**

| Variabel                  | Sig t | Sig 0,05 | Keterangan  |
|---------------------------|-------|----------|---|
| Kompetensi Perangkat Desa | 0,101 | 0,0      | Karena nilai sig. 0,101 > probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama ditolak   |
| Kepemimpinan Kepala Desa  | 0,000 | 0,05     | Karena nilai sig. 0,000 < probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama diterima. |
| Partisipasi Masyarakat    | 0,000 | 0,05     | Karena nilai sig. 0,000 < probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama diterima. |

Sumber: Data primer diolah (2019)

Uji t pertama dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala desa (X<sub>2</sub>) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y). Berdasarkan tabel output SPSS Coeficients, diketahui nilai Signifikansi (Sig) variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y) sebesar 0,000. Karena nilai sig. 0,000 < probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama diterima. Artinya, tidak ada pengaruh Kompetensi Perangkat Desa (X<sub>1</sub>) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y).

Sedangkan pada uji t menunjukkan bahwa t hitung sebesar 5,262 dan t tabel sebesar 1,9820. Dari perbandingan tersebut diperoleh bahwa t hitung sebesar 5,262 > 1,9820, maka dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama diterima. Artinya ada pengaruh variabel Kompetensi Perangkat Desa (X<sub>1</sub>) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y).

Dalam mendeskripsikan temuan dari hasil jawaban responden pekerja Puskesmas Bara-baraya Kota Makassar, sebagaimana telah diungkapkan di depan, diketahui bahwa terdapat banyak faktor yang memberikan dampak pada peningkatan prestasi kerja Pekerja. Namun dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi peningkatan prestasi kerja Pekerja dibatasi pada faktor kemampuan intelektual dan kepemimpinan. Penunjuk yang dipergunakan untuk mengukur pengaruh tersebut memperlihatkan eratnya hubungan antara faktor dependen (prestasi kerja

Pekerja) dengan faktor independen (kemampuan intelektual dan kepemimpinan). Tetapi seberapa besar hubungan tersebut, belum dapat diketahui. Analisis regresi linier berganda dipergunakan untuk menjawab persoalan tersebut.

**Tabel 1. Uji F**

| Model   | Sig F  | Sig 0,05 | Keterangan  |
|---------|--------|----------|---|
| Uji Sig | 0,000  | 0,05     | Karena nilai sig.0,000<probabiligtas 0,05, maka variabel X secara similitan berpengaruh terhadap variabel Y sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.                       |
| Model   | F Hit. | F Tabel  | Keterangan  |
| Uji F   | 81.862 | 2,69     | Karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F Tabel maka dapat disimpulkan variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y, dan H1 atau hipotesis pertama diterima. |

Berdasarkan tabel output SPSS, diketahui nilai F dihitung adalah sebesar 81,862 dan F Tabel sebesar 2,69. Dari nilai tersebut, dapat dihitung bahwa F hitung sebesar  $81.862 > F$  tabel sebesar 2,69, maka dapat H0 diterima. Ini berarti bahwa kompetensi perangkat desa (X1), Kepemimpinan Kepala Desa (X2), dan Partisipasi Masyarakat (X3) secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Y).

## PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dan hasil uji hipotesis, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Variabel kompetensi perangkat desa (X1) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan (Y); 2) Variabel kepemimpinan kepala desa (X2) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa; 3) Variabel partisipasi masyarakat desa (X3) berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa (Y); 4) Variabel kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat desa secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis merekomendasikan

atau menyarankan bahwa: 1) Perangkat desa harus di upgrade dan ditingkatkan kompetensinya secara berkesinambungan melalui pendidikan, pelatihan, studi banding. Peningkatan kompetensi perangkat desa secara otomatis dapat memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang lebih baik; 2) Kepala desa agar menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut menjadi penekanan untuk menjaga kepercayaan pemerintah kabupaten dan pusat dan masyarakat; 3) Melibatkan masyarakat berpartisipasi dan berperan aktif terlibat dalam penyusunan dan mengawasi pengelolaan keuangan desa. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik dan terkendali bebas dari temuan-temuan;

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2015). *Akuntabilitas, Transparan dan Responsivitas*. Diambil kembali dari <http://www.keuandangesa.com>
- Dharma, S. (2005). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- F.Prihadi, S. (2004). *Assesment Centre*. Jakarta.: Gramedia Pustaka Utama.
- Firmansyah. (2019). Mengupas Transfer Ke Daerah dan Desa Dalam APBN 2019. <https://bppk.kemenkeu.go.id>
- G.Northouse, P. (2017). *Kepemimpinan, Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Indeks.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- H. Pasolong. (2015). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Hamzah, A. (2015). *Tata Kelola Pemerintah Desa Menuju Desa Mandiri Sejahtera dan Partisipatoris*. Surabaya: Pustaka.
- Mada, S.,Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola DanaDesa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Akuntansi Universitas Samratulangi*, 1-12.
- Mustakim, M. Z. (2015). *Kepemimpinan Desa*. Jakarta: KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Nadir, S. (2013). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan*

- Masyarakat. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 1-21.
- Praba Dewi, N. K., & Gayatri. (2019). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 26 Issue 2. 1269-1298.
- RI. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Mendagri. RI, K. K. (Disampaikan pada Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017.
- Riduwan. (2003). *Dasar-Dasar Statiska*. Bandung: Alfabeta.
- Riduwan. (2007). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rosyidi, M. (2018). Pengaruh Transpransi, Kompetensi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *JOM FEB*, Volume 1, Edisi 1, 1-14.
- Santoso, A, D. (2017). *Teori dan Aplikasi Penelitian Kuantitatif dengan Menggunakan Metode SEM*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Sudaryono. (2014). *Aplikasi Statistik Untuk Penelitian*. Jakarta Pusat: Lentera Ilmu Cendekia.
- Sukmalana, S. (2008). *Metode dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Intermedia Personalia Utama.
- Triani, N. N., & Handayani, S. (2018). Praktek Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 136-155.
- V. Rivai. (2013). *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Depok: PT. Rajagrafindo.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 02, No. 02 , 1-20.
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). Jakarta: Salemba Empat.
- Zainal, R. V., Basalamah, S., & Muhammad, N. (2014). *Islamic Human Capital Management (Manajemen Sumber Daya Insani)*. Edisi Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- (2014). *Islamic Human Capita Management, Cara Tepat dan Mudah Dalam Menerapkan Manajemen Sumber*